

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan dan menganalisis peran pemerintah dalam proses pemberdayaan penun tenun khas Bima oleh Dinas Koperindag Kota Bima. Era Revolusi Industri 4.0 menuntut UMKM menjadi lebih kreatif dan inovatif. Penun tenun khas Bima mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan berubah menjadi industri kreatif. Inovasi dan kreasi terus dilakukan mulai dari tahap produksi hingga pada tahap distribusi. Hal ini tentu tak lepas dari peran pemerintah dalam proses pemberdayaannya.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaannya oleh Soekanto dan peran pemerintah oleh Gede Diva. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Total 15 informan yang terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri, tenaga pendamping Dinas Koperindag Kota Bima, tokoh masyarakat, pengepul dan penun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan penun khas Bima, Dinas Koperindag Kota Bima menjalankan dalam 7 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan alternatif program, tahapan pemformalisasi rencana aksi, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, dan tahapan terminasi. Pelaksana pemberdayaan melalui tenaga pendamping namun masih ada beberapa miskomunikasi dengan penun tenun khas Bima dalam pelaksanaannya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam semua tahapan pemberdayaan. Peran pemerintah sebagai katalisator tidak terdapat pada tahapan persiapan dan pengkajian.

Kata kunci: tenun khas Bima, industri kreatif, pemberdayaan, peran pemerintah

ABSTRACT

The aims of this research is to find out how the empowerment process and analyze the role of government in the empowerment process of Bima's traditional weaver by Bima City Industrial and Trade Cooperatives Office. The Industrial Revolution 4.0 Era demanded that MSMEs become more creative and innovative. As happened to Bima's traditional weaver, experienced significant development and turned into a creative industry. Innovation and creation continue to be improved starting from the production until distribution stage. This certainly cannot be separated from the role of government in the process of empowerment.

To answer the problem formulation, this research uses the theory of the stages of empowerment by Soekanto and the role of government by Gede Diva. This study uses qualitative methods, the technique of determining the informants using purposive sampling techniques. A total 15 informants consisted of the Section Head of Industrial Coaching and Development, assistant staff Departement of Cooperatives and Industry Bima City, community leaders, collectors and weavers.

The results of this study indicate that (1) The Bima City Industrial and Trade Cooperatives Office has carried out 7 stages namely the preparation stage, the assessment stage, the alternative planning stage, the formalization of the action plan, the implementation stage, the evaluation stage, and the termination stage. Implementing empowerment through assistants, but there are still some miscommunications with Bima's traditional weaver in the implementation. The government acts as a facilitator and regulator in all stages of empowerment. The role of the government as a catalyst is not found in the preparation and assessment stages.

Keywords: Bima's weave, creative industries, empowerment, government's role